

DESENTRALISASI PENGELOLAAN PENDIDIKAN

Tarwin Manurung*

Abstrak

Rendahnya mutu dan kulaitas pendidikan di daerah disebabkan oleh tidak seragamnya akses dan sistem pemerataan pendidikan sehingga menuntut adanya perbaikan dalam penataan dan pengelolaan pendidikan yang mampu mengangkat harkat martabat dan derajat manusia. secara umum ditemukan berbagai kelemahan dalam sentralisasi pendidikan seperti: 1). Kemampuan Pembiayaan Pendiidikan; 2). Kesenjangan Mutu Pendidikan; 3). Effisiensi Pengelolaan pendidikan; 4) Pemerataan Kesempatan Memperoleh Pendidikan; 5). Penataan Kelembagaan Pendidikan; 6). Pembelajaran Muatan Lokal; 7). Peningkatan Peranserta Masyarakat 8). Penataan Kelembagaan pemerintah di bidang pendidikan. Gambaran masalah pendidikan diatas dituntut perubahan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan yakni desentralisasi pendidikan yang mampu memberikan ruang dan kesempatan kepada daerah untuk mampu mengelola pendidikan secara mandiri, partisipatif, otonom dan pelibatan masyarakat dalam membangaun dan mengembangkan pendidikan

Kata kunci: *Desentralisasi Dan Pengelolaan Pendidikan*

PENDAHULUAN

Desentralisasi pendidikan merupakan isu penting dan cenderung menjadi pilihan di era demokratisasi dan globalisasi. Hal ini demikian, karena sentralisasi pengelolaan pendidikan yang selama ini diterapkan telah menyebabkan kemampuan daerah dalam mengurus pendidikan kurang berkembang sehingga menjadi kendala bagi mutu pendidikan nasional. Namun, penerapan desentralisasi pendidikan tidak dapat dipisahkan dari arah sistem penyelenggaraan pemerintahan, dan bahkan sistem pendidikan merupakan subsistem dari sistem pemerintahan yang akan memberikan otonomi luas pada kabupaten/kotamadya maka sebagian besar wewenang pendidikan seyogyanya diserahkan pada kabupaten/kotamadya dan bahkan sampai pada tingkat sekolah.

KAJIAN TEORITIS

1. KONSEP DESENTRALISASI PENDIDIKAN

Paradigma manajemen dalam desentralisasi di kemukakan Thoha, adalah: 1) dari orientasi manajemen pemerintahan yang sarwa negara (state driven) menjadi berorientasi pasar, 2) dari orientasi manajemen pemerintahan yang otoritarian menjadi berorientasi pada demokrasi, 3) dari sentralisasi kekuasaan menjadi desentralisasi kewenangan, dan 4) perubahan sistem pemerintahan yang membatasi

* Sekertaris Dinas pendidikan kab. Labuhan Batu Selatan

Tarwin Manurung

pada batas-batas dan aturan-aturan yang mengikat suatu negara menjadi tatanan pemerintah yang cenderung “boundaryless organization”, sehingga tata manajemen pemerintahan yang cenderung di pengaruhi oleh tata aturan global.

Konsep desentralisasi dan implikasinya di kemukakan oleh Tim Bappenas, sebagai berikut: 1) implikasi administrasi, yakni pemberian kewenangan yang lebih besar kepada daerah untuk ikut melaksanakan kegiatan pembangunan, 2) implikasi kelembagaan, yakni kebutuhan untuk meningkatkan kapasitas perencanaan dan pelaksanaan unit-unit kerja daerah, 3) implikasi keuangan, yakni kebutuhan dana yang lebih besar bagi daerah untuk dapat melaksanakan fungsinya di bidang pembangunan, dan 4) implikasi pendekatan perencanaan pendidikan, yakni kebutuhan untuk memperkenalkan model pendekatan kewilayahan yang bermula dari bawah, dengan melibatkan peranserta masyarakat semaksimal mungkin.

Pengertian desentralisasi pendidikan di kemukakan oleh Thoaha adalah upaya untuk mendelegasikan sebagian atau seluruh wewenang dalam bidang pendidikan yang seharusnya di lakukan oleh unit atau pejabat pusat kepada unit atau pejabat di bawahnya, atau dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, atau dari pemerintah kepada masyarakat. Salah satu wujud dari desentralisasi itu ialah terlaksananya proses otonomi dalam penyelenggaraan pendidikan.

Hamijoyo, mengatakan dalam pelaksanaan desentralisasi pendidikan yang harus di perhatikan adalah: 1) pola dan pelaksanaan manajemen harus demokratis, 2) pemberdayaan masyarakat harus menjadi tujuan utama, bukan semata-mata kewibawaan atau kekuasaan pemerintah daerah, 3) peranserta masyarakat, bukan hanya pada “stake-holders”, harus menjadi bagian mutlak dari sistem pengelolaan, 4) pelayanan harus lebih cepat, efisien, efektif, melebihi pelayanan era sentralisme demi kepentingan peserta didik dan rakyat banyak, dan 5) keanekaragaman aspirasi dan nilai serta norma local harus di hargai dalam kerangka dan demi pengutan sistem pendidikan nasional.

Selanjutnya Mahdiansyah, mengemukakan pola manajemen dalam desentralisasi pendidikan di dasarkan pada: 1) sumber daya manusia yang berkualitas, 2) manajemen tidak harus seragam, tetapi di sesuaikan dengan situasi dan kondisi daerah, 3) mengutamakan efisiensi dan efektivitas, 4) tanggung jawab tertuju pada pemerintah dan masyarakat, 5) di perlukan manajemen yang transparan, 6) peningkatan eselonisasi, 7) penghilangan ego-sektoral, 8) pemanfaatan sarana dan prasarana secara optimal, dan 9) pemanfaatan dana dan sumber daya lebih luwes.

Menurut Tim Teknis Bappenas bekerjasama dengan Bank Dunia, bahwa pelaksanaan desentralisasi pendidikan tidak berarti menciutkan substansi pendidikan menjadi substansi yang bersifat local dan sempit, serta berorientasi pendidikan bersifat primordial yang dapat menumbuhkan sentimen kedaerahan. Dengan kata lain, desentralisasi pendidikan di artikan sebagai pelimpahan kekuasaan dan wewenang yang lebih luas kepada daerah untuk membuat perencanaan dan mengambil keputusannya sendiri dalam mengatasi permasalahan yang di hadapi di bidang pendidikan, namun tetap mengacu kepada tujuan pendidikan nasional sebagai bagian dari upaya pencapaian tujuan pembangunan nasional.

Berdasarkan pendapat para pakar tersebut di atas, prinsip pelaksanaan desentralisasi pendidikan adalah: 1) manajemen pendidikan di laksanakan secara demokratis, transparan, sesuai dengan kondisi daerah, dan didukung oleh SDM yang berkualitas, 2) meningkatkan partisipasi masyarakat, 3) pelayanan harus lebih cepat, efisien, efektif, dan melebihi pelayanan dalam era sentralisasi, 4) tidak menciutkan substansi pendidikan menjadi substansi yang bersifat; local, sempit, primordial dan sentimen kedaerahan, 5) melimpahkan wewenang kepada daerah untuk menyusun perencanaan dan mengambil keputusan guna mengatasi masalah pendidikan yang mengacu pada tujuan pendidikan nasional, 6) organisasi pendidikan yang bersifat luwes, dan 7) pemanfaatan sumber daya secara optimal dan luwes.

2. KONSEP MANAJEMEN BERBASIS SEKOLAH

Ada beberapa istilah yang berkaitan dengan konsep manajemen berbasis sekolah yaitu: school based management atau shool based decision making ang management. Menurut Samani, konsep dasar school based management adalah mengalihkan pengambilan keputusan dari pusat/kanwil/kandep ke level sekolah. Dengan adanya pengalihan kewenangan pengambilan keputusan ke level sekolah, maka sekolah di harapkan lebih mandiri dan mampu menentukan arah pengembangan yang sesuai dengan kondisi dan tuntutan lingkungan masyarakatnya.

Selanjutnya Rumtini dan Jiyono, mengemukakan bahwa MBS merupakan bentuk alternatif sekolah dalam program desentralisasi bidang pendidikan, yang di tandai dengan adanya otonomi yang luas di tingkat sekolah, partisipasi masyarakat yang tinggi, dan dalam kerangka kebijaksanaan pendidikan nasional. Otonomi di berikan agar sekolah dapat leluasa mengelola sumber daya dengan mengalokasikannya sesuai dengan prioritas kebutuhan dan agar sekolah tanggap

Tarwin Manurung

terhadap kebutuhan setempat. Masyarakat di tuntut partisipasinya agar mereka lebih memahami pendidikan, membantu, serta mengontrol pengelolaan pendidikan. Sedangkan kebijaksanaan nasional yang menjadi prioritas pemerintah harus pula di laksanakan oleh sekolah. Dalam MBS, sekolah di tuntut memberi pertanggung jawaban kepada masyarakat dan pemerintah.

Dengan adanya pemberian ruang gerak yang luas, di harapkan akan muncul kreativitas, tanggung jawab, dan upaya yang sungguh-sungguh untuk mengembangkan sekolah. Dalam jangka panjang MBS akan mendorong tumbuhnya ciri-ciri khusus sekolah sesuai dengan potensi daerah setempat. Di daerah yang memiliki potensi kesenian sangat mungkin akan muncul sekolah yang memiliki keunggulan di bidang seni. Dalam jangka panjang keunggulan yang bervariasi ini akan menjadi awal kebanggaan warga sekolah dan masyarakat sekitarnya. Oleh karena itu, dalam MBS sekolah di beri ruang gerak yang luas dalam menjabarkan kurikulum. Dengan cara ini, setiap sekolah memiliki peluang untuk menjadi sekolah unggul sesuai dengan potensi yang di milikinya. MBS akan merupakan wahana penumbuhan *school based development* (SBD), artinya pengembangan sekolah yang di dasarkan atas potensi yang dimiliki.

Osborn & Gaebler dalam Samani, mengatakan bahwa dalam MBS peran birokrasi pendidikan lebih banyak bersifat *guiding* bukan *rowing*. Harus tetap di sadari bahwa pendidikan merupakan tangga mobilitas *vertical* yang efektif bagi anak dan sekolah menuju era global. Perkembangan menuju era global tersebut tetap harus bertumpu pada *jatidiri local* dan nasional.

Dalam rangka pelaksanaan MBS, sekolah di tuntut mampu menampilkan pengelolaan sumber daya secara transparan demokratis, dan bertanggung jawab terhadap masyarakat maupun pemerintah. Pemerintah merumuskan kebijaksanaan pendidikan yang menjadi prioritas nasional dan merumuskan pelaksanaan MBS, sekolah menjabarkannya sesuai dengan potensi dan lingkungan.

Rumtini dan Jiyono, mengemukakan tujuan MBS adalah: 1) peningkatan efisiensi pendidikan di peroleh melalui antara lain; keleluasaan mengelola sumberdaya, partisipasi masyarakat, dan penyederhanaan birokrasi, 2) peningkatan mutu pendidikan, diperoleh antara lain; melalui partisipasi orangtua terhadap sekolah, fleksibilitas pengelolaan sekolah dan kelas, peningkatan profesionalisme guru dan kepala sekolah, berlakunya *system insentif/disinsentif*, dan lainnya, dan 3) peningkatan pemerataan pendidikan, diperoleh melalui peningkatan partisipasi masyarakat yang memungkinkan pemerintah lebih berkonsentrasi, misalnya hanya pada kelompok kurang mampu.

3. PERMASALAHAN POKOK PENGELOLAAN PENDIDIKAN DAN UPAYA PEMECAHANNYA

Beberapa permasalahan pokok yang diprediksikan akan dihadapi Daerah dalam pengelolaan pendidikan adalah sebagai berikut.

1. *Kemampuan Pembiayaan Pendidikan*

Sebagai implikasi diberlakukannya desentralisasi pendidikan seiring dengan diberlakukannya otonomi daerah, tidak dapat dihindari akan terjadi keberagaman kemampuan daerah dalam menyediakan anggaran untuk membiayai pendidikan. Persoalan yang dihadapi adalah bagaimana melalui otonomi daerah ini masing-masing Daerah Kabupaten/Kota dapat menjamin bahwa wajar Dikdas 9 tahun dapat dituntaskan dalam waktu relatif sama, sementara potensi dan kemampuan setiap daerah berbeda-beda.

Upaya pemecahannya adalah dengan komitmen daerah terhadap program pendidikan tentu saja harus diperlihatkan melalui penyediaan anggaran yang memadai, karena anggaran merupakan parameter yang paling utama di dalam memperlihatkan prioritas apa yang dilakukan oleh sebuah pemerintah.

2. *Kesenjangan Mutu Pendidikan*

Apabila anggaran pendidikan yang dialokasikan tidak memadai, dan juga tidak didukung oleh pengelola pendidikan yang professional, maka persoalan yang potensial terjadi dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah selain merosotnya mutu pendidikan, juga semakin tingginya kesenjangan mutu pendidikan. Potensi terjadinya kesenjangan mutu pendidikan dapat disebabkan oleh perbedaan potensi daerah untuk membiayai pendidikan, termasuk dalam memberikan insentif kepada guru dalam menjaring guru-guru yang bermutu.

Untuk mengatasi dan mengurangi kesenjangan mutu pendidikan, antara lain dapat dilakukan dengan: (a) mengamankan anggaran pendidikan di tingkat nasional, yaitu melalui komitmen yang disepakati bersama antara pemerintah dengan daerah, (b) menetapkan standar pelayanan minimal yang harus diberikan dalam setiap jenis, jenjang dan jalur pendidikan yang disertai dengan indikator kinerjanya, (c) menetapkan satuan biaya operasional pendidikan per siswa dan satuan biaya guru yang relatif sama.

3. *Effisiensi Pengelolaan pendidikan*

Dalam kondisi keterbatasan sumber dana, maka untuk memacu peningkatan kualitas pendidikan dalam pelaksanaan otonomi daerah perlu dilakukan melalui

Tarwin Manurung

meningkatkan efisiensi pendidikan, baik menyangkut efisiensi pengelolaan (technical efficiency) maupun efisiensi dalam mengalokasikan anggaran (economic efficiency).

Beberapa cara yang dapat ditempuh untuk mengurangi pemborosan, antara lain. (a) perampingan organisasi pengelola pendidikan, serta membatasi biaya pengelolaan pendidikan di kantor dan di sekolah, (b) mengaitkan paket bantuan (block grants) dengan pencapaian hasil pendidikan, (c) melakukan pengelolaan bersama terhadap pengadaan komponen pendidikan, yang lebih efisien dilakukan secara kolektif .

4. Pemerataan Kesempatan Memperoleh Pendidikan

Pelaksanaan otonomi pendidikan selain dapat meningkatkan aspirasi masyarakat akan pendidikan, diperkirakan juga akan meningkatkan pemerataan memperoleh kesempatan pendidikan. Kemudian apabila kesempatan memperoleh pendidikan ini juga mempengaruhi kesempatan untuk memperoleh penghasilan, maka dalam jangka panjang akan berpotensi meningkatkan jurang kesenjangan ekonomi antar Daerah Kabupaten/Kota.

Upaya untuk mengatasi permasalahan ini dapat dilakukan dengan berbagai cara, antara lain: (a) mengembangkan sistem subsidi silang antara daerah berdasarkan komitmen bersama dan intervensi Pemerintah Pusat, (b) menyediakan alokasi dana khusus untuk memberikan bantuan melalui jalur pendidikan alternatif bagi anak-anak yang kurang beruntung, (c) mengembangkan sistem multi-exit dan multi entry dalam sistem pendidikan dari berbagai jalur, jenis, dan jenjang, termasuk bagi mereka yang berasal dari jalur pendidikan alternatif.

5. Penataan Kelembagaan Pendidikan

Keberhasilan pembinaan Pendidikan dasar memiliki arti yang sangat penting bagi keberhasilan pendidikan secara keseluruhan dan berkelanjutan. Oleh karena itu, dalam penataan kelembagaan pendidikan dasar yang harus mendapat perhatian dari Pemerintah Daerah, antara lain. (a) R-Grouping Sekolah dasar, dengan mempertimbangkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pendidikan, (b) Optimalisasi Pendidikan Berbasis Sekolah dalam rangka pengembangan Pendidikan Berbasis Masyarakat (PBM), (c) Akselerasi Pendidikan dasar untuk SLTP, (d) Rekayasa pengkayaan kurikulum menuju PBM, dan (e) pengembangan pendidikan Keterampilan terapan.

6. Pembelajaran Muatan Lokal

Pada era otonomi daerah, pendidikan agama, budi pekerti dan budaya daerah termasuk persoalan mendasar yang perlu mendapat perhatian. Pendidikan

budaya daerah perlu mendapat perhatian dalam proses pembelajarannya sebagai kekayaan asset nasional, untuk mendukung semangat nasionalisme. Termasuk dalam pendidikan budaya adalah pembelajaran bahasa daerah secara memadai, karena bahasa daerah akan menunjukkan budaya daerah.

7. Peningkatan Peranserta Masyarakat

Salah satu tujuan UU No.22 tahun 1999 adalah untuk memberdayakan masyarakat, menumbuhkembangkan prakarsa dan kreativitas, meningkatkan peranserta masyarakat, termasuk dalam meningkatkan sumber dana dan penyelenggaraan pendidikan. Sementara itu, bagi daerah-daerah tertentu yang kurang memiliki potensi untuk mendapatkan dukungan partisipasi masyarakatnya, perlu dilakukan intervensi kebijakan nasional yang dapat menggairahkan partisipasi dan peran serta masyarakat dalam pendidikan.

Upaya meningkatkan komitmen peranserta masyarakat dalam menunjang pendidikan, termasuk dari dunia usaha, antara lain melalui. (a) melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan tentang pendidikan terutama ditingkat sekolah, (b) melanjutkan program imbal swadana, yaitu pemerintah baru akan memberikan sejumlah bantuan tertentu pada sekolah apabila masyarakat telah menyediakan sejumlah biaya pendampingnya, dan (c) mengembangkan sistem sponshorship bagi kegiatan pendidikan.

8. Penataan Kelembagaan pemerintah di bidang pendidikan

Pengelolaan pendidikan dasar di daerah sampai saat ini dilakukan oleh Diknas Pendidikan. Kandep Diknas merupakan instansi vertical yang menangani semua kebijaksanaan pemerintah Pusat yang ada di daerah, mulai dari Pendidikan Taman Kanak-kanak, Pendidikan Dasar sampai Pendidikan Menengah, serta Pendidikan Luar Sekolah. Sementara itu Dinas Pendidikan dan kebudayaan merupakan instansi otonom, yang keberadaanya sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah, mulai dari personalianya sampai dengan anggarannya.

Dengan diberlakukannya otonom daerah, maka dengan sendirinya kedua instansi yang sama-sama mengelola pendidikan akan dilebur menjadi satu. Semua instansi vertical yang ada di daerah kabupaten dan kota sudah harus dileburkan menjadi satu dan dijadikan Dinas Otonom yang sepenuhnya berada langsung di bawah pemerintah daerah..

PEMBAHASAN

Sebagaimana diuraikan sebelumnya bahwa pelaksanaan otonomi daerah dimaksudkan untuk mendorong pemberdayaan masyarakat, peran serta masyarakat,

Tarwin Manurung

serta meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengatur rumah tangganya sendiri, termasuk di bidang pendidikan. Upaya tersebut hendaknya dapat meningkatkan efektivitas, efisiensi dan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan pendidikan itu sendiri. Untuk itu diperlukan intervensi baru dalam pengelolaan pendidikan agar nilai tambah dilaksanakan otonomi daerah dapat dioptimalkan.

Intervensi yang dimaksud adalah mencakup kurikulum muatan nasional, otonomi kurikulum dan standarisasi mutu pendidikan, alokasi anggaran pendidikan, “*fit and proper test*” pengelola pendidikan, pemerataan SDM, manajemen berbasis sekolah, dan “resources sharing”.

Pertama, untuk menjaga dan mempererat persatuan dan kesatuan bangsa maka di dalam penyusunan kurikulum sekolah di seluruh Indonesia perlu dipertahankan mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn). Ada empat prinsip yang harus dilakukan dalam penerapan PKn berbasis portofolio, yakni. (1) Penerapan PKn bukan menjadi bagian indoktrinasi politik pemerintah, tetapi sebagai pendidikan intelektual, (2) PKn harus dapat mengembangkan state of mind atau kemampuan bernalar menggunakan logika, (3) Pembelajaran PKn harus menjadi proses pencerdasan dengan pendekatan yang lebih partisipatif, dan (4) PKn harus menjadi laboratorium demokrasi, sehingga dalam proses pembelajarannya yang dilakukan bukan teaching demokrasi, tetapi doing demokrasi. (Suryadi, 2001).

Kedua, kurikulum yang baik adalah kurikulum yang dinamis, yakni yang sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman. Di samping itu, untuk memenuhi tuntutan dalam rangka otonomi daerah, maka kurikulum yang dikembangkan adalah kurikulum yang memiliki standar nasional dan kurikulum yang disesuaikan dengan kebutuhan daerah (muatan local). Otonomi daerah seharusnya juga dapat meningkatkan kemampuan pengelola pendidikan dalam penyusunan dan mengembangkan kurikulum sekolah.

Ketiga, karena banyak daerah yang Sumber daya Alam (SDA)-nya terbatas dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang rendah dengan sendirinya alokasi untuk anggaran pendidikan tidak akan banyak. Selain sumber dana yang berasal dari APBN dan APBD (PAD), sejalan dengan otonomi daerah sekolah-sekolah diberikan kebebasan untuk dapat mencari dan menggali sumber-sumber dana lainnya guna pembiayaan pendidikannya. Sumber-sumber dana tersebut dapat berasal dari peran serta masyarakat, donatur-donatur, alumni, dan lainnya.

Keempat, penentuan pejabat atau pengelola pendidikan seiring dengan pemberlakuan otonomi daerah akan terjadi pertentangan antar putra daerah dengan non daerah. Untuk mengatasi hal tersebut sebaiknya pengangkatan pejabat di

lingkungan pendidikan, termasuk Kepala Dinas TK I, Tk II, dan kepala sekolah perlu dilakukan melalui uji kelayakan dan kepatutan.

Kelima, Sumber daya Manusia (SDM) yang ada di daerah belum seimbang dan merata, sedangkan pada sisi lain terjadi kesenjangan. Untuk itu, diperlukan intervensi agar terjadi pemerataan SDM di daerah Kabupaten/Kota tanpa melanggar hak-hak asasi manusia. Disamping itu, dengan pemberlakuan otonomi daerah maka pengangkatan, penempatan, mutasi dan pemberhentian guru dilaksanakan oleh daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keenam, perlu dilakukan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS), karena pengelolaan sekolah selama ini bersifat sentralistik dan telah menghambat kreativitas sekolah. Dengan pelaksanaan MBS paling tidak ada empat keuntungan, yakni. (1) efektivitas, dimana sekolah dan guru sudah mendapat kepercayaan dari masyarakat dan orang tua bagi kemajuan anaknya, (2) efisiensi, program peningkatan Mutu Berbasis sekolah memberikan kepercayaan seluas-luasnya kepada sekolah dalam mengelola sumber daya seoptimal mungkin sesuai dengan prioritas kebutuhannya, (3) relevansi, program peningkatan Mutu Berbasis Sekolah, masyarakat dan orang tua diikut-sertakan dalam pengambilan keputusan yang dilakukan sekolah, (4) pemerataan dan keadilan, otonomi daerah dilakukan untuk menjamin pemerataan dan keadilan. Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) pada intinya menegakkan demokratisasi dalam pengelolaan proses pembelajaran.

Ketujuh, pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan hendaknya dilakukan secara fleksibel oleh sekolah-sekolah. Pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan harusnya dapat dimanfaatkan bersama di lingkungan pendidikan maupun di luar dengan prinsip resourcer sharing.

KESIMPULAN

Perolehan hasil belajar tidak secara signifikan dipengaruhi oleh sistem yang diterapkan; sentralistik dan desentralistik, namun seberapa besar dan seberapa banyak wewenang kependidikan diserahkan kepada struktur yang berada di bawah. Namun, untuk kondisi Indonesia, sistem desentralistik sangat relevan mengingat kondisinya yang sangat pluralistic dan multicultural. Terbukti sistem sentralistik selama ini kurang efisien dan efektif.

Sebagai konsekuensi logis dari pemberlakuan UU Nomor 22 dan 25 tahun 1999 maka pengelolaan pendidikan nasional dapat meningkatkan demokratisasi, pemerataan mutu pendidikan, terciptanya rasa kesetiakawanan, penentuan

Tarwin Manurung

pengelola pendidikan dalam pengelolaan pendidikan lebih optimal, dan sarana dan prasarana dapat dimanfaatkan secara lebih efisien.

Menerapkan intervensi pengelolaan pendidikan tersebut membawa implikasi kepada perubahan organisasi serta pembagian tugas dan kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah. Peran pemerintah pusat membuat kebijakan pendidikan, sedangkan pemerintah daerah menjabarkan dan melaksanakannya secara berencana, sistematis, bertahap dan berkesinambungan. Hanya dengan cara demikian, implikasi otonomi di bidang pendidikan mengarah kepada sistem yang lebih demokratis, kreatif, efisien dan efektif.

DAFTAR PUSTAKAN

- Alhumami, Amich. (2000). Pembangunan Pendidikan dalam Konteks Desentralisasi. *Harian Kompas* 11 September
- Green, Andy. (2001). *Educational Achievement in centralized and Decentralized Systems*. New York: Oxford University Press.
- Misbach, H. (2001). Problematika Pendidikan dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah. *Mimbar pendidikan* No.2/XX
- Mahdiansyah, et.al. (1999). Desentralisasi Pengelolaan Pendidikan. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan* No.017 Tahun Ke-5 Juni
- Suryadi, Ace. (2001). PKn "Gaya Baru" Bisa Berikan Pengalaman Berdemokrasi. *Kompas* 20 Oktober.